

`BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki masalah kependudukan sebagai masalah pokok yang harus dihadapi berkaitan dengan jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi (Sejati, 2021). Tingginya laju pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada kualitas penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sendiri melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki program untuk menangani masalah pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan menekan angka fertilitas melalui program keluarga berencana (KB). Angka kelahiran total/*total fertility rate* (TFR), dapat menunjukkan suatu daerah atau negara dalam pelaksanaan pembangunan baik di bidang sosial ekonomi dan keberhasilan dalam program keluarga berencana (KB) yang terlaksana (Sulistiawan *et al.*, 2020).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009, KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Program KB bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan kualitas reproduksi di Indonesia (Kemenkes RI, 2021). Program KB sendiri memiliki permasalahan yang harus dihadapi dapat dilihat dari tingginya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi dalam *unmet need* (Sulistiawan *et al.*, 2020).

Berdasarkan Survei Rencana pembangunan jangka menengah nasional/survei kinerja dan akuntabilitas program (RPJMN/SKAP) dari tahun 2016 sampai 2018, Pada tahun 2017 persentase *unmet need* di Indonesia berada pada kisaran angka 17,50%, dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 12,4%. Di Provinsi Jawa barat sendiri sejak tahun 2017 sampai 2023 persentase *unmet need* sendiri terus mengalami penurunan dari 11,00% pada tahun 2017 hingga mencapai angka 9,01 % pada tahun 2023

dengan target *unmet need* pada tahun 2024 sebesar 7,4% penurunan tersebut terjadi Karena kekhawatiran Akseptor terhadap efek samping penggunaan dan sebagian tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan tidak ingin ber-KB (BKKBN, 2024). Sedangkan Kabupaten Cirebon dengan *unmet need* sebesar 19,77% angka tersebut masih jauh dari target *unmet need* pada tahun 2024 (Cirebon Satu Data, 2023). Di Puskesmas Kedaton berdasarkan data yang di dapat, aseptor Kb baru pada tahun 2023 sebanyak 499 aseptor dan 462 sebagai aseptor KB pasca persalinan dari 10.423 WUS. Mengingat belum semua WUS memilih untuk ber-KB dikarenakan belum menikah (Puskesmas Kedaton, 2023).

Tingginya angka *unmet need* akan berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu (AKI) di Indonesia. *Unmet need* sendiri dapat menyebabkan terjadinya Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) yang memiliki dua risiko sekaligus, yang pertama jika kehamilan tidak diinginkan (KTD) berlanjut kehamilan tersebut akan berjarak sangat dekat dengan kehamilan sebelumnya yang berisiko pada kehamilan, persalinan, dan nifas yang yang berkontribusi pada kematian ibu (Nurchayani dan Widiyastuti, 2021).

Upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi dapat diatasi dengan memberikan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas, salah satunya dalam program KB pasca persalinan (Sembiring, Suwardi dan Saragih, 2020). KB Pasca Persalinan (KBPP) adalah pelayanan KB yang diberikan kepada PUS setelah persalinan sampai kurun waktu 42 hari, dengan tujuan untuk menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kesuburan, sebagai salah satu upaya pencegahan tingginya angka *Unmet need* (Asih, Andriyani dan Luthfa, 2023).

Faktor penyebab tingginya *unmet need* adalah Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) mengenai KB yang selama ini dilaksanakan masih belum menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat, diantaranya mengenai media edukasi/alat bantu yang berkaitan dengan komplikasi KB, efek samping dan kegagalan dalam KB. Budaya masyarakat setempat mengenai pengambilan keputusan yang masih dipegang sepenuhnya oleh suami sehingga banyak calon

akseptor yang tidak ber KB karena ketidak setujuan suami (Nurchayani dan Widyastuti, 2020).

Upaya untuk menurunkan *unmet need* dapat dilakukan melalui sosialisasi, promosi, penyuluhan, penggerakan dan konseling mengenai program KB yang di lakukan tenaga kesehatan sebagai pemegang program yang kompeten dengan memanfaatkan media yang mudah di pahami oleh petugas dan masyarakat berupa alat atau media sehingga pemahaman dan perubahan dalam ber-KB (Iskandar dan Mishbahuddin, 2021). Proses dalam pelaksanaan KB yang di lakukan penyedia layanan khususnya dalam pelaksanaan konseling, selama ini menggunakan lembar balik sebagai Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) (Direktorat Kesehatan Keluarga Kemenkes RI, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bidan koordinator di Puskesmas Kedaton bahwa penggunaan lembar balik ABPK masih digunakan, oleh bidan dalam membantu klien untuk menentukan keputusan ber-KB sebagai media penyampian informasi namun, hanya pada pasien kunjungan awal saja. Mengingat lembar balik dirasa cukup merepotkan karen berat jika gunakan dalam memberikan asuhan, sehingga tidak digunakan pada klien kunjungan ulang.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa lembar balik jarang digunakan. Mengingat efektivitas penggunaan lembar balik ABPK yang lumayan rumit dan menyita waktu. Informasi tersebut diperoleh dari enam bidan di Kota Cirebon, Lembar balik berisi pengetahuan dan penggunaan alat kontrasepsi sebagai media edukasi yang digunakan oleh bidan meskipun hampir seluruh bidan telah mengikuti pelatihan dalam penggunaan lembar balik ABPK (Nurchayani dan Widyastuti, 2020).

Penelitian Nurchayani dan Widiyastuti (2021) telah menghasilkan media konseling mengenai KB dalam bentuk aplikasi ABPK ber-KB yang mengacu pada lembar balik ABPK. Sehingga aplikasi ABPK ber-KB ini lebih menguntungkan dibanding lembar balik. Kemudian itu pada tahun 2022 juga

telah dihasilkan si KB pintar, yang berpedoman kepada lembar balik ABPK, yaitu aplikasi yang dibuat untuk digunakan oleh klien dan keluarga agar bisa berdiskusi kembali dengan suami dirumah setelah diberikan penjelasan oleh bidan. Saat ini aplikasi si KB pintar sudah tersedia di *playstore*

Selain penelitian diatas terdapat beberapa penelitian juga menyimpulkan penggunaan media aplikasi sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam ber-KB dapat memudahkan bagi bidan dan calon akseptor KB (Ernawati *et al.*, 2023). Sedangkan Pemanfaatan media digital juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan faktor determinan calon akseptor KB dalam memilih kontrasepsi, terutama metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (Lajuna dan Sari, 2022). Salah satu aplikasi yang dapat memudahkan bidan dalam penapisan adalah roda klop KB efektivitas aplikasi roda klop KB sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan ber-KB (Sitiyaroh dan Mariska, 2023).

Pengambilan keputusan ber KB harus didukung oleh keluarga salah satunya suami dimana suami bersama ibu mendapatkan informasi melalui media aplikasi tersebut sehingga suami sangat berperan dalam menentukan keputusan dalam berKB. Dukungan dari suami biasanya datang dalam bentuk perhatian sehingga dapat memberikan kepastian dan keyakinan kepada ibu nifas sebagai calon aseptor KB (Sekar, Setiyadi dan Hijriyati, 2022).

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan Asuhan kebidanan Ny.N usia 23 tahun P₂ A₀ nifas dengan pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam pengambilan keputusan ber KB melalui media aplikasi di UPTD Puskesmas Kedaton.

B. RUMUSAN MASALAH

“Bagaimana asuhan kebidanan pada Ny.N usia 23 tahun P₂ A₀ dengan pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam pengambilan keputusan ber KB melalui media aplikasi di UPTD Puskesmas Kedaton?”.

C. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Mampu melakukan Asuhan Kebidanan Nifas Dengan Pemberdayaan Ibu dan Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Ber KB Melalui Media Aplikasi.

2. Tujuan Khusus

- a. Mampu melakukan pengkajian data subjektif terhadap ibu.
- b. Mampu melakukan pengkajian data objektif terhadap ibu.
- c. Mampu menegakkan analisis dengan tepat berdasarkan data subjektif dan objektif pada ibu.
- d. Mampu melakukan penatalaksanaan sesuai dengan analisis pada ibu.
- e. Mampu mengevaluasi asuhan kebidanan terkait dengan pemberdayaan ibu dan keluarga dalam pengambilan keputusan ber KB
- f. Mampu mengidentifikasi kesenjangan antara teori dengan kasus di lahan praktik.

D. MANFAAT

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan sehingga dapat meningkatkan wawasan bagi pembaca khususnya mahasiswa lain dalam pemberian asuhan kebidanan ibu nifas dengan pemberdayaan ibu dan keluarga dalam pengambilan keputusan ber KB.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan disusunnya laporan ini dapat dimanfaatkan oleh institusi sebagai referensi kepustakaan khususnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan ber KB. dan Bagi Tenaga Kesehatan diharapkan dapat menjadi salah satu alat yang sangat penting dibandingkan lembar balik ABPK dan dapat memudahkan bidan/tenaga kesehatan serta klien dalam pengambilan keputusan ber-KB. dan bagi Puskesmas Diharapkan pemanfaatan media informasi digital yang lebih praktis tersebut dapat di

sebarluaskan lagi sehingga akan lebih membermudah bidan dalam memberi kn konseling terutama mengenai KB menggunakan media aplikasi.